

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, SISTEM PENGUKURAN ANGGARAN, DAN IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Oktavima Wisdaningrum

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
oktavima@untag-banyuwangi.ac.id

Abstract

Good governance in the management of public agencies is the result of the accountability of organizational performance. Performance accountability of government agencies is evidence of the duties of government agencies in order to account for the success or failure of implementing the organization's vision and mission in achieving the goals and objectives that have been set. Accountability is believed to be the main factor that can change unfavorable conditions into better ones, especially in public services. This study aims to see the effect of budget planning, budget measurement systems and performance-based budget implementation on the performance accountability of the Banyuwangi Regency Government, the approach method in this research is to use a quantitative approach methodology using SPSS version 20 data processing tools, and the results of this study found there is a positive influence of budget planning and implementation of performance-based budgeting on the performance accountability of the Banyuwangi Regency Government, while the measurement system variable has no effect on the performance accountability of the Banyuwangi Regency Government. The implications of this research are expected to provide scientific contributions and references for the Banyuwangi Regency Government in budget management to support the performance of the Banyuwangi Regency Government.

Keyword: *Budget Planning, Budget Measurement Systems, And Performance-Based Budget Implementation On Performance Accountability*

1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah mengakibatkan adanya desentralisasi termasuk dalam urusan fiskal. Pemerintah daerah wajib memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga desentralisasi dapat terwujud. Artinya, pemerintahan daerah tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintahan pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Disisi lain, otonomi daerah juga bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih atau yang biasa disebut dengan istilah *good governance* (Habibi, 2015)

Good governance pada pengelolaan instansi publik merupakan hasil dari akuntabilitas kinerja

organisasi. Secara praktik, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum maksimal diterapkan, sebagai bukti sebagian besar pemerintah daerah justru menghadapi permasalahan terkait akuntabilitas kinerja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Wilayah Regional II yang meliputi pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur bahwa hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh KemenPAN RB tahun 2016 menunjukkan terjadinya peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota sebesar 49,87 yang

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,95. Meskipun terjadi peningkatan, rata-rata nilai evaluasi AKIP kabupaten/kota pada tahun 2016 masih dibawah 50, yang artinya rata-rata kabupaten/kota masih berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota mendapat nilai di bawah B. (www.menpan.go.id, 2018)

Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang secara mandiri mengelola pemerintahannya. Fenomena menarik yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi terkait dengan diperolehnya nilai AKIP pada tahun 2016-2020 yakni predikat “Memuaskan” dengan nilai “A”. Nilai tersebut menjadikan Banyuwangi sebagai Kabupaten dengan nilai AKIP terbaik se-Indonesia dan satu-satunya. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, Kabupaten Banyuwangi bisa naik kelas dari level A ke AA, sementara level Reformasi Birokrasinya juga bisa ditingkatkan dari BB ke A. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kesungguhan dan keseriusan dari seluruh SKPD di Banyuwangi. (www.banyuwangikab.go.id, 2021). Prestasi pemerintah Kabupaten menjadikan peneliti tertarik untuk mengkajinya secara empiris.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti perencanaan anggaran, sistem pengukuran kinerja, dan implementasi anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, sistem pengukuran kinerja, dan implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan Anggaran

Pengertian perencanaan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 yaitu proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, perencanaan merupakan tahapan yang paling krusial dikarenakan besaran kebutuhan anggaran seluruh program/kegiatan dirumuskan dalam perencanaan, sehingga keberhasilan dari perealisasi/pelaksanaan anggaran kegiatan

berawal dari perencanaannya (Alumbida et al., 2016).

Anggaran dapat digunakan untuk (1) merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan selaras dengan visi dan misi; (2) membuat rencana program/kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya; (3) mengalokasikan dana untuk program/kegiatan; dan (4) menetapkan indikator kinerja serta skala pencapaian strategi. Aspek perencanaan yang kurang matang mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, penentuan anggaran yang ditetapkan akan berdampak pada pelaksanaan program kerja yang tidak mampu dijalankan dengan baik, dikarenakan perencanaan anggaran tidak selaras dengan program kerja yang ditetapkan (Mardiasmo, 2009).

Sistem Pengukuran Kinerja

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui apakah sebuah organisasi telah beroperasi secara baik, yaitu dengan tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran kinerja maka dasar pengambilan keputusan yang relevan dapat dikembangkan dan dipertanggungjawabkan. Hasil pengukuran kinerja akan digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu strategi yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu pengukuran kinerja sebagai alat bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerjanya. Terdapat empat elemen pokok dalam suatu pengukuran kinerja antara lain: (1) menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi, (2) merumuskan indikator dan ukuran kinerja, (3) mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi organisasi, (4) evaluasi kinerja (Mahsun, 2013).

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) didefinisikan sebagai suatu sistem penganggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Tahap implementasi anggaran berbasis kinerja merupakan tahap penggunaan informasi kinerja dalam proses penganggaran untuk memberikan dampak pada efisiensi, efektivitas, dan pengambilan keputusan, serta akuntabilitas.

Pencapaian implementasi anggaran berbasis kinerja dapat dilihat pada keterkaitan hasil program dengan target/tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Madjid dan Ashari (2013) dalam (Rizaldi, 2016) penerapan anggaran berbasis kinerja didasari oleh landasan konseptual yang meliputi: (1) Proses pengalokasian anggaran yang berorientasi pada kinerja; (2) Proses pengalokasian anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas fungsi unit kerja yang telah melekat pada struktur organisasi; dan (3) Adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Selain itu, penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Instrumen tersebut yakni indikator kinerja untuk mengukur kinerja; standar biaya untuk menetapkan standar biaya masukan maupun keluaran sebagai perhitungan kebutuhan anggaran; dan evaluasi kinerja sebagai penilaian capaian sasaran kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintahan sebagai bentuk demokrasi dan tanggung jawab menyangkut seluruh kegiatannya kepada masyarakat, serta merupakan salah satu unsur pokok dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintah yang baik (*good corporate governance*). Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban dari pihak yang

diberi amanah kepada pihak pemberi amanah untuk tanggung jawab yang diberikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatannya.

Akuntabilitas kinerja disajikan dalam wujud laporan pertanggungjawaban, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Bentuk akuntabilitas selain berbentuk laporan tertulis atas terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan juga harus disertai dengan evaluasi. Evaluasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dampak atas terlaksananya kegiatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya akuntabilitas pada instansi pemerintahan mendorong terwujudnya *good government governance* seperti yang sudah dituangkan pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Akuntabilitas akan mempersempit celah terjadinya korupsi, sehingga peningkatan akuntabilitas publik juga sama halnya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan kepada jenis penelitian *explanatory*. Penelitian ini dilakukan di seluruh instansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Antara lain meliputi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banyuwangi. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh instansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Responden yang dipilih diyakini telah memahami kondisi di dalam instansi yang ditempati. Responden adalah pejabat dinas/badan/sekretariat/kecamatan yang terlibat dalam proses penyusunan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yaitu Kepala Subbagian Perencanaan, Program, dan Pelaporan.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *quota sampling*. Peneliti menentukan dari masing-masing OPD diambil 2 responden, yakni pejabat yang berhubungan atau terkait dengan penyusunan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja pada suatu OPD. OPD di Kabupaten Banyuwangi berjumlah 25 OPD, sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 50.

Variabel independen terdiri dari perencanaan anggaran, sistem pengukuran

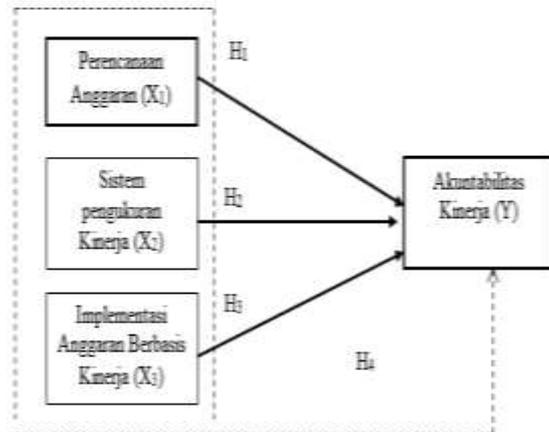
kinerja, dan implementasi anggaran berbasis kinerja. Sedangkan variabel dependen adalah akuntabilitas kinerja. Setiap variabel pada penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner dengan 5 skala Likert. 1 untuk “sangat tidak setuju”, 2 untuk “tidak setuju”, 3 “netral”, 4 “setuju”, dan 5 “sangat setuju”.

Pengukuran variabel perencanaan anggaran menggunakan instrumen yang digunakan dalam penelitian (Nadianti, 2018). Indikator pernyataan perencanaan anggaran mencakup: a) partisipasi, b) akurasi data, c) waktu pengesahan APBD, d) pendekatan dan instrumen dalam penyusunan anggaran, e) perencanaan dan kebutuhan, f) revisi atas perubahan.

Pengukuran variabel sistem pengukuran kinerja menggunakan instrumen yang digunakan dalam penelitian (Nadianti, 2018). Indikator pernyataan sistem pengukuran kinerja mencakup: a) indikator *output* dan *outcome*, b) kepuasan pelanggan, c) kualitas dari produk/layanan yang tersedia, d) efisiensi operasi.

Pengukuran variabel implementasi anggaran berbasis kinerja menggunakan instrumen yang digunakan dalam penelitian (Nadianti, 2018). Indikator pernyataan implementasi anggaran berbasis kinerja mencakup: a) *input*, *output* dan *outcome* program/kegiatan, b) hubungan pengeluaran dengan hasil, c) keterkaitan program/kegiatan dengan sasaran, d) *value for money* (prinsip ekonomis, efisien dan efektif), e) partisipasi pegawai, f) pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, g) pelaporan anggaran berbasis kinerja.

Pengukuran variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan instrumen yang digunakan dalam penelitian (Nadianti, 2018). Indikator pernyataan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencakup: a) perencanaan strategis, b) pengukuran kinerja, c) pelaporan kinerja, d) pemanfaatan informasi kinerja.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Terdapat dua jenis analisis yang digunakan, yakni analisis statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, *mean*, *standard deviation*, *minimal*, dan *maximal*. Sedangkan Statistik inferensial merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk menentukan tingkat kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang didapat dari populasi (Abdillah dan Hartono, 2015:91). Untuk memudahkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 20.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini melakukan pengujian pengaruh perencanaan anggaran, sistem pengukuran kinerja dan implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berikut persamaan regresi dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

dimana,

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

X₁ = Perencanaan Anggaran

X₂ = Sistem Pengukuran Kinerja

X₃ = Implementasi Anggaran Berbasis

Kinerja

e = eror

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada posisi Kepala dan Subbagian Perencanaan, Program, dan Pelaporan OPD Kabupaten Banyuwangi terbanyak berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 30 orang atau sebanyak 60%, sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 20 orang atau sebanyak 40%. Responden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 3 responden (6%), responden berusia 36-45 tahun sebanyak 14 responden (28%), dan 33 responden berusia di atas 45 tahun. Kesimpulannya, karakteristik responden berdasarkan usia pada penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia di atas 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala pada Subbagian Perencanaan, Program, dan Pelaporan OPD Kabupaten Banyuwangi di dominasi oleh orang yang sudah berumur (dewasa). masa kerja <10 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 6%, masa kerja 11 – 15 tahun sebanyak 5 orang atau 10%, masa kerja 16 – 20 tahun sebanyak 8 orang atau 16% dan masa kerja >20 tahun sebanyak 34 orang atau 68%. Kesimpulannya Kepala dan Subbagian Perencanaan, Program, dan Pelaporan OPD Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh pegawai-pegawai yang sudah lama bekerja yaitu di atas 20 tahun. Pendidikan terakhir S1 sebanyak 29 (58%). Responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 19 responden (38%), pendidikan terakhir S3 sebanyak 1 responden (2%), dan pendidikan terakhir lain-lain sebanyak 1 responden (2%). Mayoritas responden berpendidikan S1, kemudian di susul S2. Hal ini mengindikasikan bahwa Kepala dan Sub bagian Perencanaan, Program, dan Pelaporan OPD Kabupaten Banyuwangi memiliki kualitas pendidikan yang baik.

Selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengukur seberapa valid dan reliabel instrument penelitian. Berdasarkan tabel hasil uji validitas dapat dilihat bahwa nilai r hitung lebih besar (>) dari r tabel (0,284) dan signifikansi semua item di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas, nilai dari *Alpha Cronbach* untuk semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga instrumen pernyataan yang digunakan dalam variabel Perencanaan Anggaran

(X1), Sistem Pengukuran Kinerja (X2), Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X3), dan Akuntabilitas Kinerja (Y) sudah handal (reliabel).

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik diantaranya, uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 1
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.96890428
	Absolute	.083
Most Extreme Differences	Positive	.049
	Negative	-.083
Kolmogorov-Smirnov Z		.587
Asymp. Sig. (2-tailed)		.881

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : SPSS Versi 20

Berdasarkan hasil uji K-S diketahui nilai Kolgomorov Smirnov adalah sebesar 0,587 dimana nilai ini lebih kecil daripada Z tabel (1,97) atau nilai signifikansinya 0,881 lebih besar dari pada 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Kedua, uji Multikolinieritas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui bahwa antara variabel independen tidak berkorelasi.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PA	.965	1.036
	SBK	.740	1.352
	IA	.721	1.387

a. Dependent Variable: AKIP

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tersebut di atas di ketahui bahwa nilai VIF adalah 1,036 untuk variabel perencanaan anggaran, 1,352 untuk variabel sistem pengukuran kinerja, dan 1,387 untuk variabel implementasi anggaran berbasis kinerja. Nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas.

Ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan varian dari residual pada model regresi.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.007	.322		-.021	.983
1 PA	.085	.052	.237	1.621	.112
SPK	.010	.056	.029	.176	.861
IA	-.035	.068	-.087	-.516	.608

a. Dependent Variable: abs_resid

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas terlihat bahwa signifikansi pada variabel Perencanaan Anggaran (PA) sebesar 0,112; Sistem Pengukuran Kinerja (SPK) sebesar 0,861; dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (IA) sebesar 0,608. Nilai signifikansi dari seluruh variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.

Analisis data berikutnya adalah tentang uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Uji t dilakukan untuk melakukan pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujiannya dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis di terima. Berikut hasil output hasil uji t pada penelitian ini.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.073	.567		1.891	.065
1 PA	.209	.092	.251	2.260	.029
SPK	.042	.099	.053	.419	.677
IA	.522	.120	.560	4.358	.000

a. Dependent Variable: AKIP

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa nilai t hitung untuk variabel X1 sebesar 2,260

dengan nilai signifikansi sebesar 0,029. Artinya nilai t hitung untuk X1 sebesar 2,260 lebih besar dari t tabel sebesar 2,01290. Sedangkan nilai signifikansi sudah lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 tentang pengaruh perencanaan anggaran (PA) terhadap akuntabilitas kinerja diterima.

Nilai t hitung untuk variabel X2 sebesar 0,419 dengan nilai signifikansi sebesar 0,677. Artinya nilai t hitung untuk X2 sebesar 0,419 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,01290. Sedangkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 tentang pengaruh sistem pengukuran kinerja (SPK) terhadap akuntabilitas kinerja ditolak.

Selanjutnya, nilai t hitung untuk variabel X3 sebesar 4,358 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,01290. Sedangkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 3 tentang pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja (IA) terhadap akuntabilitas kinerja diterima.

Uji F digunakan untuk pengujian model penelitian. Pengujian uji F dengan melihat nilai F hitung dan F tabel serta nilai signifikansi. Berikut hasil uji F dalam penelitian ini

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3.241	3	1.080	12.694	.000 ^b
Residual	3.915	46	.085		
Total	7.155	49			

a. Dependent Variable: AKIP

b. Predictors: (Constant), PA, SPK, IA

Berdasarkan hasil uji F dapat dilihat nilai F hitung sebesar 12,694 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya nilai F hitung sebesar 12,694 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 8,59. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih besar dari 0,005. Secara simultan variabel independen dalam penelitian ini (perencanaan anggaran, sistem pengukuran kinerja, dan implementasi anggaran berbasis kinerja) mempengaruhi variabel dependen (akuntabilitas kinerja). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima.

Selanjutnya, pengujian terhadap koefisien determinasi (R²). Besarnya nilai koefisien determinasi menunjukkan tingkat kemampuan

variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel dependen.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.673 ^a	.453	.417	.29172

a. Predictors: (Constant), PA, SPK, IA

b. Dependent Variable: AKIP

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,417, artinya 41,7% variabel akuntabilitas kinerja dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari perencanaan anggaran, sistem pengukuran anggaran dan implementasi anggaran berbasis kinerja dan sisanya sebesar 58,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengaruh Perencanaan Anggaran Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis 1 yang berbunyi perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja diterima. Artinya terdapat pengaruh antara perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran maka akuntabilitasnya semakin baik, dengan kata lain untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD Banyuwangi maka dibutuhkan perencanaan anggaran yang baik pula.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wibisono, 2016), (Syuliswati & Asdani, 2017) serta (Sofyani & Prayudi, 2018). Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Friska, 2014) dan (Sembiring, 2014) yang membuktikan secara empiris bahwa perencanaan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi daerah.

Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil pengujian pada hipotesis 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh sistem pengukuran kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Hipotesis 2 menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara sistem pengukuran kinerja terhadap akuntabilitas kinerja adalah ditolak. Artinya sistem pengukuran kinerja tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat (Sadjiarto, 2000) yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja bukan merupakan faktor tunggal yang dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan sistem pengukuran kinerja memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Pemakaian pengukuran kinerja menggunakan satu ukuran tertentu tidak dapat menggambarkan secara komprehensif hasil yang dicapai oleh instansi pemerintahan.
2. Sistem pengukuran kinerja tidak menjelaskan alasan yang membuat pemerintah hanya fokus mencapai prestasi tertentu, bagaimana meningkatkannya dan sejauhmana faktor lain mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut.

Hasil penelitian ini berbeda dengan (Sofyani & Akbar, 2015) yang menyebutkan bahwa implementasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya sistem pengukuran kinerja memiliki dampak yang positif pada akuntabilitas kinerja. Dengan sistem pengukuran kinerja yang berkualitas maka akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sistem pengukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya penerapan sistem pengukuran kinerja tidak akan memberikan dampak pada akuntabilitas kinerja sebuah organisasi.

Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis 3 yang berbunyi implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap

akuntabilitas kinerja diterima. Artinya terdapat pengaruh antara implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi anggaran berbasis kinerja maka akuntabilitasnya semakin baik, dengan kata lain untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD Banyuwangi maka dibutuhkan implementasi anggaran berbasis kinerja yang baik pula.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Friska, 2014), (Sembiring, 2014), (Wibisono, 2016), serta (Sofyani & Prayudi, 2018). Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian yang dilakukan (Friska, 2014) dan (Wibisono, 2016) menjelaskan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja. Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian (Friska, 2014) dan (Wibisono, 2016) yaitu sama-sama membuktikan secara empiris bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja yang baik dibutuhkan apabila sebuah organisasi ingin meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Begitu juga sebaliknya, apabila anggaran berbasis kinerja tidak dirumuskan secara detail maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga menurun.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi. Artinya, semakin tinggi perencanaan anggaran yang dilakukan instansi pemerintah, maka hal ini akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas instansi tersebut. Variabel Sistem pengukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa sistem pengukuran kinerja bukanlah faktor yang mendorong akuntabilitas kinerja instansi. Isu terkait keterbatasan sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah menjadi hal yang krusial dan perlu diperbaiki. Sedangkan variabel

Implementasi anggaran berbasis kinerja mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi. Hasil ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi implementasi anggaran berbasis kinerja di suatu instansi, maka hal tersebut mendorong semakin tingginya akuntabilitas kinerja instansi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran untuk berbagai pihak. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian terkait akuntansi sektor publik khususnya tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian ini hendaknya dapat melakukan perbaikan strategi penyebaran kuesioner. Hal ini dikarenakan kesibukan instansi pemerintah dan kemungkinan kuesioner tidak diisi oleh responden yang menjadi objek penelitian. Agar waktu pengembalian responden dapat dilakukan secara efisien, peneliti selanjutnya dapat menunggu dan memastikan responden menyelesaikan kuesioner. Selain itu, secara berkala terdapat acara rapat SKPD di DPRD sehingga peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan momen tersebut untuk menyebar kuesioner.

Bagi pemangku kepentingan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pengambilan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Peneliti fokus pada temuan penelitian yang menyebutkan bahwa sistem pengukuran kinerja tidak mempengaruhi akuntabilitas. Berdasarkan hasil ini, pemerintah dapat melakukan pengkajian ulang terkait pengukuran kinerja instansi agar kedepan mampu mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi yang lebih baik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada penelitian ini banyak yang mempunyai keterlibatan secara langsung ataupun tidak langsung, maka dengan itu tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini sehingga dapat hasil penelitian yang maksimal.

6. REFERENCE

- Alumbida, D. I., Saerang, D. P. E., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Accountability*, 5(2), 141. <https://doi.org/10.32400/ja.14431.5.2.2016.141-151>
- Friska. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Provinsi Jambi). *Jurnal Vokasi Akuntansi*, 1(1), 75-81., 1, 75–81.
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 117–124. [https://doi.org/10.1016/0014-4894\(54\)90048-X](https://doi.org/10.1016/0014-4894(54)90048-X)
- Mahsun. (2013). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 4). BPFU UGM.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Nadianti, R. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 7 No 1.
- Rizaldi, D. R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Jakarta II). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(3), 85–104. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i3.43>
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), pp.138-150. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15674>
- Sembiring, K. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 15.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah Dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja : *Jaai*, 19(2), 153–173.
- Sofyani, H., & Prayudi, M. A. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja “A.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 54–64. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/download/35755/22921/>
- Syuliswati, A., & Asdani, A. (2017). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Politeknik Negeri Malang. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 24(1), 1–17. <http://journal.stiemce.ac.id/index.php/jabm/article/view/79%3E>
- Wibisono, R. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(9), 1–22.
- www.banyuwangikab.go.id. (2021). *Bupati Ipuk Minta SAKIP dan Reformasi Birokrasi Banyuwangi Naik Kelas*. <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/bupati-ipuk-minta-sakip-dan-reformasi-birokrasi-banyuwangi-naik-kelas.html>
- www.menpan.go.id. (2018). *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan*

Reformasi Birokrasi. Dua Dapat A, 17 Raih BB, Rapor Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II Naik.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dua-dapat-a-17-raih-bb-rapor-akuntabilitas-kinerja-pemda-wilayah-ii-naik>